

Catatan JP 40:

Derita Berwajah Perempuan

Hasil penelitian dari lembaga internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan yakni OXFAM, akhirnya melansir sebuah data yang berhasil dihimpun dari Aceh, India dan Srilanka, bahwa yang menjadi korban bencana tsunami di bulan Desember 2004 yang lalu mayoritas adalah perempuan. Sekitar 170.000 perempuan dari sekitar 183.000 jiwa telah terenggut nyawanya karena bencana tsunami. Sungguh angka yang fantastis. Dalam bencana akibat konflik di berbagai wilayah di Indonesia seperti Poso, Ambon, Aceh di masa DOM dan Timor-Timur masa disintegrasi, umumnya perempuan juga mengalami derita multidimensi: lari mengungsi bersama anak-anak, kehilangan suami, menjadi orang tua tunggal, menjadi pencari nafkah utama, mengalami perundungan dan kekerasan seksual, terabaikannya hak-hak reproduksi, dan sebagainya.

Saya jadi ingat ucapan seorang aktivis perempuan yang mempertanyakan pada tim medis di Aceh: "Mana bidannya?" Ternyata kebutuhan itu tidak terpikirkan oleh mereka. Sebuah pola berpikir yang jamak: menganggap setiap bencana itu netral gender. Padahal ada atau tidak adanya bencana dan tsunami selalu akan ada perempuan yang hamil dan melahirkan.

Namun rupanya usaha untuk memahami bencana berwajah perempuan ini ternyata juga mendapat tentangan yang tak kalah kuat dari masyarakat yang notabene masih "berwajah laki-laki". Simak cerita rekan dari UNFPA misalnya, yang mereka lakukan sebenarnya adalah mencoba memahami kebutuhan perempuan itu dengan membagikan hygiene kits bagi perempuan yang isinya antara lain pembalut, pakaian dalam, dan sebagainya. Tapi pemberian itu diboikot oleh pengungsi laki-laki sebelum mereka juga mendapatkan hygiene kits juga.

Beberapa organisasi internasional seperti UNFPA bahkan terus memantau pelaksanaan dari program yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup perempuan yang dicanangkan dalam ICPD (International Conference on Population and Development di Kairo tahun 1994). Prinsip-prinsip ICPD antara lain: kesetaraan gender; terjaminnya akses terhadap kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana; menurunnya angka kematian

ibu; menghilangkan segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk remaja dan anak perempuan. Berpegangan pada prinsip ini, maka, setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus memperhatikan kebutuhan perempuan dari dua sisi, perempuan sebagai makhluk yang rentan maupun sebaliknya, yang memiliki beragam kemampuan. Dengan memperhatikan kedua sisi ini, maka program pasca bencana harus meliputi pencegahan dan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan melalui ketersediaan layanan kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan reproduksi, akses terhadap pendidikan dan ketrampilan, serta mempromosikan partisipasi perempuan dalam setiap usaha rehabilitasi dan rekonstruksi.

Target pencapaian dari ICPD memang terus dievaluasi setiap lima tahun, dan nampaknya memang belum pernah membahas dampak dari bencana alam yang begitu maha dahsyat memporakporandakan seluruh infrastruktur dan sistem. Karena selama ini yang telah dibahas adalah berkaitan dengan dampak bencana akibat wilayah konflik terhadap perempuan. Tentunya ini sangat berbeda karena wilayah konflik tidak berdampak pada hancurnya seluruh infra struktur dan sistem. Oleh sebab itu, kini persoalan penanganan pasca bencana tsunami dan kondisi perempuan yang demikian kompleksnya bisa menjadi pelajaran dan masukan yang sangat berharga dalam pertemuan lima tahunan ICPD pada tahun 2009 nanti.

Diharapkan, masyarakat dunia kelak akan memiliki panduan yang lebih lugas guna menangani dampak bencana alam besar, khususnya terhadap perempuan korban. Selain itu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harusnya juga beranjak dari kepercayaan bahwa mendidik perempuan sama artinya dengan mendidik masyarakat secara keseluruhan, sebab bicara soal perempuan akan selalu berkorelasi dengan peran reproduksi dan anaknya. (AV)